



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan di suatu negara. Dalam rangka peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, menyatakan bahwa:

Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pemerintah daerah selain bersifat otonom, juga merupakan organisasi sektor publik yang bersifat non-profit. Dikarenakan sifat non-profit tersebut, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Almanda, 2012 dalam Jatmiko, 2020). Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kinerja, diantaranya yaitu akuntabilitas, pengendalian internal, dan transparansi.

Akuntabilitas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi kinerja pemerintah. Menurut Rusdiana dan Nasihudin (2018), akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun horizontal.



Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki beberapa poin penting yaitu (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban; (2) terdapat hubungan antara pemberi amanat dengan penerima alamat; (3) antara kedua belah pihak terhubung karena tugas tertentu; (4) serta hubungan dapat terjadi secara vertikal maupun horizontal.

Pengendalian internal merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja selanjutnya. Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah:

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki beberapa poin penting yaitu (1) dilakukan secara terus menerus; (2) dilakukan oleh seluruh anggota organisasi baik pimpinan maupun anggota; (3) bertujuan untuk memberikan keyakinan akan pencapaian visi organisasi; serta (4) terdapat beberapa bentuk yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berjalan dengan optimal sebagai contoh keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan lain sebagainya.

Kemudian faktor yang terakhir yaitu transparansi. Menurut Damayanti dan Hermanto (2018).

Transparansi merupakan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Dengan adanya transparansi, kondisi akhir yang diharapkan yaitu timbulnya kepercayaan publik terhadap pemerintah sehingga berujung pada tingkat penilaian kinerja pemerintah yang baik pula.

Salah satu bentuk dari tata pemerintahan yang baik dapat dilihat dari hasil opini audit pada laporan keuangan. Fenomena tentang akuntabilitas, pengawasan internal dan transparansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari opini audit yang dicapai pada Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selama 6 tahun terakhir yaitu mulai tahun 2015 sampai 2020 seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Opini Audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau terhadap LKPD
Kabupaten Indragiri Hilir 2015 sampai dengan 2020

No.	Tahun	Opini Audit
1.	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2.	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6.	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: <https://riau.bpk.go.id> (2021)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa hasil opini audit pada Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada 2016 s.d 2020 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, sedangkan opini audit pada 2015 adalah Wajar Dengan Pengecualian. Hal tersebut merupakan suatu perkembangan yang baik. Meskipun demikian, didalam Surat Resmi dari Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Riau yang ditujukan kepada Bupati Indragiri Hilir mulai tahun 2017 sampai dengan 2020, juga disebutkan adanya pokok-pokok hasil pemeriksaan lainnya yang harus menjadi bahan perbaikan untuk seterusnya.



Pokok permasalahan yang terus menerus muncul mulai tahun 2017 sampai dengan 2020 adalah kelemahan pada Sistem Pengendalian Internal dalam penyusunan laporan keuangan. Akuntabilitas dan Transparansi yang baik tercermin dari Sistem Pengendalian Internal yang baik pula.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jatmiko (2020), *Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman*. Variabel independen yaitu Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi, sedangkan variabel dependen yaitu Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) Pengawasan Internal berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sleman; 2) Akuntabilitas mempengaruhi secara positif dan secara signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman; 3) Transparansi berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja Regional Pemerintah Kabupaten Sleman.

Damayanti dan Hermanto (2018), *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah*. Variabel independen diantaranya yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal, sedangkan variabel dependen yaitu Kinerja Pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya; 2) Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya; serta 3) Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya.



Berdasarkan 2 penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengadopsi variabel independen dan dependen dari kedua penelitian tersebut. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dari segi tahun serta objek penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dengan objek penelitian OPD pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan mengangkat penelitian ini adalah untuk membuktikan bagaimana pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap Kinerja dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan membuat karya tulis yang berjudul **PENGARUH AKUNTABILITAS, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH (STUDI PADA OPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang diidentifikasi dalam penelitian terbatas pada hal sebagai berikut.

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?
4. Apakah Akuntabilitas, Pengendalian Internal, dan Transparansi berpengaruh secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?



1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Akuntabilitas, Pengendalian Internal, dan Transparansi secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi tanggung jawab ke pihak pemberi tanggung jawab.

2. Pengendalian Internal

Pengendalian internal dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian hasil pekerjaan yang dilakukan.

3. Transparansi

Transparansi memberikan bentuk keterbukaan sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

4. Kinerja Pemerintah

Kinerja pemerintah merupakan bentuk gambaran tingkat pencapaian sasaran sebagai perwujudan dari visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yang ditujukan bagi peneliti itu sendiri adalah untuk menambah pengetahuan mengenai Pengaruh Akuntabilitas, Pengendalian Internal, dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yang ditujukan bagi instansi pemerintah yaitu dapat memberikan informasi bagi OPD mengenai Pengaruh Akuntabilitas, Pengendalian Internal, dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Manfaat praktis dari penelitian ini yang ditujukan bagi peneliti selanjutnya yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk rekan mahasiswa maupun peneliti selanjutnya, misalnya untuk peneliti yang ingin meneliti dengan tema atau variabel yang sama.

4. Bagi Pihak Lain

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan sebagai acuan bagi instansi lain dalam menjalankan instansi tersebut serta dapat dijadikan masukan terkait faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan kinerja instansi.



1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, serta prosedur pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data serta pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan pembahasan dari hasil yang diperoleh setelah diadakan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.